



# RENCANA KERTJA

DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2022

## **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

### **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V**

### **PENUTUP**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan juga mempertimbangkan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Bone.

Watampone, 08 Juli 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bone



dr. Hj. Nurminah A. Yusuf, MARS  
Pangkat Pembina Utama Muda  
Nip. 19641206 199903 2 002



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan  
Lampiran II : Dinas Kesehatan



Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 30 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48



# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraannya didasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Permasalahan kesehatan yang muncul dapat diselesaikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang bersinergi dan berkesinambungan.

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka di susunlah Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Kerja (RENJA). Rencana kerja ini adalah dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan atau sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil

pencapaian Indikator Kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Selanjutnya Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja keras terutama semua aparatur kesehatan di lingkup Kabupaten Bone.

## **1.2. Landasan Hukum**

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renja SKPD khususnya dan perencanaan/ penganggaran daerah pada umumnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2018.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2022 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Bone pada Tahun 2022,
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2022,
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja tahun 2022 ini disusun dengan sistematika berikut ini :

- BAB I:           Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum



	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II :	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III:	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV:	Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN**

#### **TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan**

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Adapun realisasi keuangan sebesar 94,37% (Rp. 307.935.518.984) dari total dana Rp. 326.295.224.597,-.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis 2018-2023. Pada tahun 2020 alokasi dana ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan seperti penurunan angka kesakitan, melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, yang terdiri atas Pembangunan Puskesmas Lappariaja, Palakka Kahu dan Sibulue, rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Libureng, Tana Batu, Tunreng Tellu, serta pembangunan IPAL di Puskesmas Koppe, Kading, Palakka Kahu, Awangpone, Libureng, Salomekko dan Labkesda. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 837/ Menkes/ SK/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai hingga tahun 2021. Keseluruhan indikator tersebut mengacu pada kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2021 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar tujuan sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

## Tujuan dan Indikator Kesehatan 2018-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2023)
			Tahun 2019	Tahun 2023
1	Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Balita Stunting	7,47	7,27
		Angka Kematian Bayi (AKBy)	6,64	6,44
		Angka Kematian Balita (AKB)	6,86	6,66
		Angka Kematian Ibu (AKI)	67,1	63,00
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,32	0,28
		Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat	56	100
		Indeks Keluarga Sehat	0,16	0,80
		Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100
		Angka Kejadian Malaria		
		Prevalensi HIV/AIDS	0,05	0,05

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:



NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
1	Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0,74	0,11	185,1	Sangat Berhasil
		Persentase Desa / Kelurahan Sehat (%)	100	100	100	Berhasil
		Persentase Balita Stunting (%)	7,37	6,31	114,3	Sangat Berhasil
		Angka Kematian Bayi	6,54	2,06	168,5	Sangat Berhasil
		Angka Kematian Balita	6,76	2,06	169,5	Sangat Berhasil
		Angka Kematian Ibu	65	84,23	70,42	Cukup Berhasil
		Indeks Keluarga Sehat	0,30	0,225	75	Cukup Berhasil
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	Berhasil
		Angka Kejadian Malaria (per 100 penduduk)	<1	0,05	100	Berhasil
		Prevalensi HIV / AIDS (per 1000 penduduk)	0,05	0,06	80	Cukup Berhasil
		<b>Total</b>			<b>116,29</b>	

Realisasi (Fisik & Keuangan) Program dan Kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Realisasi			SISA DANA
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>PENDAPATAN</b>		<b>14,015,000,000</b>	<b>9,329,851,616</b>	<b>66.57</b>	<b>66.57</b>	<b>4,685,148,384</b>
	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>14,015,000,000</b>	<b>9,329,851,616</b>	<b>66.57</b>	<b>66.57</b>	<b>4,685,148,384</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14,015,000,000	9,329,851,616	66.57	66.57	4,685,148,384
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>326,295,224,597</b>	<b>307,935,518,984</b>	<b>94.37</b>	<b>98.06</b>	<b>18,359,705,613</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14,094,600,000</b>	<b>5,398,800,000</b>	<b>38.30</b>	<b>100.00</b>	<b>8,695,800,000</b>
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,094,600,000	5,398,800,000	38.30	100.00	8,695,800,000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>67,363,275,244</b>	<b>65,977,232,944</b>	<b>97.94</b>	<b>100.00</b>	<b>1,386,042,300</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67,363,275,244	65,977,232,944	97.94	100.00	1,386,042,300
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>421,632,390,000</b>	<b>354,005,389,000</b>	<b>83.94</b>	<b>100.00</b>	<b>67,627,001,000</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,838,550,000	4,570,000,000	94.45	100.00	268,550,000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	136,920,340,000	124,368,740,000	90.83	100.00	12,551,600,000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,973,500,000	4,970,000,000	99.93	100.00	3,500,000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,700,000,000	6,200,000,000	71.26	100.00	2,500,000,000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266,200,000,000	213,896,649,000	80.35	100.00	52,303,351,000
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,998,900,000,000</b>	<b>1,949,855,000,000</b>	<b>97.53</b>	<b>100.00</b>	<b>49,045,000,000</b>

	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,843,100,000	1,794,155,000	97.34	100.00	48,945,000
	- Pengadaan Mebel	155,800,000	155,700,000	99.94	100.00	100,000
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,192,639,200</b>	<b>2,028,175,347</b>	<b>92.50</b>	<b>100.00</b>	<b>164,463,853</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208,220,000	181,404,454	87.12	100.00	26,815,546
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,984,419,200	1,846,770,893	93.06	100.00	137,648,307
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>208,420,000</b>	<b>196,118,223</b>	<b>94.10</b>	<b>100.00</b>	<b>12,301,777</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya - Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196,600,000	189,148,223	96.21	100.00	7,451,777
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,820,000	6,970,000	58.97	100.00	4,850,000
7	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>46,704,358,698</b>	<b>40,442,639,193</b>	<b>86.58</b>	<b>97.14</b>	<b>6,261,719,505</b>
	- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1,605,000,000	1,232,084,953	76.77	100.00	372,915,047
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15,997,500,658	12,433,703,113	77.72	100.00	3,563,797,545
	- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,920,672,682	4,708,749,424	95.69	100.00	211,923,258
	- Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18,356,748,358	17,617,763,143	95.97	100.00	738,985,215
	- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kaliberasi	99,098,000	98,650,000	99.55	100.00	448,000
	- Pengadaan Obat, Vaksin	5,608,631,000	4,277,506,068	76.27	80.00	1,331,124,932
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, - Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	116,708,000	74,182,488	63.56	100.00	42,525,512
8	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>199,431,401,070</b>	<b>189,820,249,479</b>	<b>95.19</b>		<b>9,611,151,591</b>
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25,407,000	0	-	0	25,407,000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3,246,018,500	2,033,095,100	62.63	100.00	1,212,923,400
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	51,240,000	47,698,000	93.09	100.00	3,542,000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36,370,000	35,910,000	98.74	100.00	460,000

	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22,547,500	21,637,500	95.96	100.00	910,000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18,400,000	5,174,000	28.12	50.00	13,226,000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00	0
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	556,832,500	529,482,000	95.09	100.00	27,350,500
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	866,857,600	270,665,600	31.22	50.00	596,192,000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100,449,600	44,868,000	44.67	80.00	55,581,600
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	159,551,400	130,464,000	81.77	100.00	29,087,400
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	350,564,200	328,919,200	93.83	100.00	21,645,000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	19,999,700	18,948,900	94.75	100.00	1,050,800
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	626,642,000	442,188,500	70.56	100.00	184,453,500
	- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	144,116,000	74,158,800	51.46	80.00	69,957,200
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	336,933,700	336,364,300	99.83	100.00	569,400
	- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	143,498,950,103	148,613,076,312	103.56	100.00	5,114,126,209
	- Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	100,037,900	92,814,129	92.78	100.00	7,223,771
	- Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12,300,000,000	12,034,238,542	97.84	100.00	265,761,458
	- Operasional Pelayanan Puskesmas	34,199,890,000	23,882,986,090	69.83	100.00	10,316,903,909
	- Operasional Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	67,999,850	30,724,000	45.18	80.00	37,275,850
	- Pelayanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	2,402,593,511	546,836,500	22.76	100.00	1,855,757,011
9	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>36,366,000</b>	<b>28,351,200</b>	<b>77.96</b>	<b>100.00</b>	<b>8,014,800</b>
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	36,366,000	28,351,200	77.96	100.00	8,014,800
10	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>324,986,000</b>	<b>323,206,800</b>	<b>99.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,779,200</b>

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak - Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	324,986,000	323,206,800	99.45	100.00	1,779,200
11	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota</b>	<b>6,593,368,393</b>	<b>6,444,907,559</b>	<b>97.75</b>	<b>100.00</b>	<b>148,460,836</b>
	- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6,593,368,393	6,444,907,559	97.75	100.00	148,460,836
12	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>696,320,000</b>	<b>190,620,000</b>	<b>27.38</b>	<b>50.00</b>	<b>505,700,000</b>
	- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	696,320,000	190,620,000	27.38	50.00	505,700,000
13	<b>Pemberian Izin, Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>20,449,050</b>	<b>14,949,050</b>	<b>73.10</b>	<b>73.10</b>	<b>5,500,000</b>
	- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,449,050	14,949,050	73.10	73.10	5,500,000
14	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>96,173,950</b>	<b>38,470,000</b>	<b>40.00</b>	<b>44.00</b>	<b>57,703,950</b>
	- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96,173,950	38,470,000	40.00	44.00	57,703,950
15	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>66,200,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>10.57</b>	<b>10.57</b>	<b>59,200,000</b>



	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	66,200,000	7,000,000	10.57	10.57	59,200,000
16	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>126,640,000</b>	<b>114,340,000</b>	<b>90.29</b>	<b>100.00</b>	<b>12,300,000</b>
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, - Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	126,640,000	114,340,000	90.29	100.00	12,300,000
	<b>TOTAL</b>	<b>326,295,224,591</b>	<b>307,935,518,984</b>	<b>94.37</b>	<b>98.00</b>	<b>18,359,705,613</b>

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2021 di Kabupaten Bone sebagai berikut :

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

No	Kegiatan	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pely. Kes Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal	14176	14176	100%
2	Pelay. Kes Ibu Bersalin	13018	13018	100%
3	Pelay. Kes Bayi Baru Lahir	13019	13019	100%
4	Pely. Kes Balita	61429	61429	100%
5	Pelay. Kes pada Usia Pendidikan Dasar	31565	31565	100%
6	Pelay. Kes pada Usia Produktif	235774	235774	100%
7	Pely. Kes Usia Lanjut	61538	61538	100%
8	Pelay. Kes Penderita Hipertensi	54487	54487	100%
9	Pely. Kes Penderita DM	9918	9918	100%
10	Pely. Kes pada Orang Gangguan Jiwa Berat	1144	1144	100%
11	Pely. Kes pada penderita TB	993	993	100%
12	Pely. Kes Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	10568	10568	100%

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal

Pengukuran terhadap capaian indikator ini ditujukan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin dan ibu terjamin. Pelayanan Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali

pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter atau dokter spesialis kebidanan. Pada tahun 2021 sebesar 14176 dari total sasaran 14176 ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sehingga Hasil realisasi indikator Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sebesar 100 %. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dipuskesmas.

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan atau dokter spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta maupun pemerintah. Adapun persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2021 terealisasi 100% dengan jumlah ibu bersalin 13018 yang ditolong oleh tenaga nakes dan semuanya mendapatkan pelayanan sesuai standar. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan pelayanan PONEK dan PONEK.

- **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Adapun hasil persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar di tahun 2021 sebesar 100% dari jumlah 13019 bayi baru lahir keseluruhnya mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI melalui IMD dan ASI Eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, talipusat, pemberian imunisasi, pemberian vitamin K, Manajemen terpadu balita Muda dan penyuluhan perawatan neonates dirumah menggunakan buku KIA.

- **Pelayanan Kesehatan Balita**

Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter yang

memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun dengan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2021 Realisasi persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 100% dengan jumlah balita 61429 dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 61429. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan peran kader dan masyarakat untuk ikut berperan dalam partisipasi bidang kesehatan dan melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat.

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkauan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan Puskesmas. Standar pelayanan yang diberikan meliputi : penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), Penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, dan penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Pada tahun 2021 persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100% dengan jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan seluruhnya sebanyak 31565 siswa. Adapun tujuan dari skrining ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit peserta didik sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan melalui sweeping serta penjadwalan ulang bagi siswa yang tidak mengikuti pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan petugas pelaksana Posbidu terlatih yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya dengan pemerinsaan minimal satu tahun sekali. Pelayanan yang diberikan adalah deteksi kemungkinan obesitas, deteksi hipertensi, deteksi kemungkinan Diabetes Melitus, deteksi gangguan mental emosial dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, dan deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan

payudara klinis dan IVA khusus untuk wanita usia subur yang berusia 30-59 tahun. Pada tahun 2021 persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar mencapai 100% dengan sasaran sejumlah 235774 orang dan yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 235774 orang.

- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis. pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmhg untuk usia di bawah 60 tahun dan <150/90 mmhg untuk usia 60 tahun keatas sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal kronis. Pada tahun 2021 persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100% dengan sasaran 54487 orang penderita hipertensi dan 54487 orang penderita telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

- Pelayanan Kesehatan Penderita DM

Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Kabupaten Bone. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau disebut dengan penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus diberikan di FKTP sesuai standar meliputi edukasi, aktifitas Fisik, Terapi Nutrisi Medis dan Intervensi farmakologis. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat dan tenaga gizi. Pada Tahun 2021 persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 100% dengan sasaran 9918 orang penderita DM dan 9918 telah mendapatkan sesuai standar.

- Pelayanan Kesehatan pada Orang Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan atau tindakan kebersihan diri ODGJ Berat. Pada Tahun 2021 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



mencapai 100% dari sasaran 1144 penderita ODGJ dan 1144 telah mendapat pelayanan sesuai standar.

- Pelayanan Kesehatan pada penderita TB

Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru terdiri dari TB BTA (+) dan BTA (-) / Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA positif. Potensi menularkan penyakit TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar disbanding TB BTA (-), Satu orang pasien TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menularkan ke orang-orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun. Pada tahun 2021 Persentase penderita TB Paru yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar mencapai 100% dengan jumlah penderita 993 penderita TB. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka konversi penderita TB Paru dengan memberikan motivasi penderita oleh PMO dan petugas kesehatan dalam hal kepatuhan minum obat.

- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes pada padan 2021 sebesar 10568 orang, dan seluruh orang yang beresiko telah mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS sehingga jumlah realisasi di Tahun 2021 sebesar 100%.

Dalam pencapaian sasaran tersebut diatas, banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang menyebabkan belum tercapainya target yang telah ditentukan. Kendala / hambatan tersebut antara lain adalah :

1. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
2. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
3. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk.
4. Proses akreditasi merupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang lama mulai dari pelatihan hingga dapat terakreditasi.

Keberhasilan capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kesadaran individu, kelompok dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat semakin meningkat, yang diwujudkan dengan adanya kesepakatan masyarakat dalam bentuk deklarasi antara lain Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan RW Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR). Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan rumah tangga yang ber PHBS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin kesehatan penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Bone
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas sudah cukup memadai, ditambah dengan tenaga kontrak medis, paramedis, apoteker, komputer, akutansi dan administrasi di masing-masing Puskesmas.
- d. Kondisi sarana dan prasarana di Puskesmas semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik dengan adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas.
- e. Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas (medis dan paramedis) melalui forum konsultasi dengan dokter spesialis dilaksanakan secara terintegrasi antar program.
- f. Puskesmas dan Rumah Sakit melaporkan setiap kasus yang berpotensi KLB secara cepat.
- g. Peran aktif petugas surveilans dalam menemukan kasus potensial KLB sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
- h. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan.
- i. Pembinaan pada industri rumah tangga makanan dan minuman melalui penyuluhan / pelatihan dapat memotivasi para pengusaha industri rumah tangga untuk melakukan kegiatan / proses produksi dengan didasari Higyene Sanitasi Personal maupun lingkungan sehingga akan mengeluarkan produk makanan & minuman yang bersih dan sehat sesuai standart kesehatan.
- j. Ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan yang tersedia sudah cukup untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Hasil analisis kinerja pelayanan dinas Kesehatan pada tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kab. Bone

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Realisasi		Realisasi Capaian
				Tahun	Tahun	Tahun
				2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93.33	95.47	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	92.9	97.81	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	67.47	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.3	25,22	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25.26	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	27.8	78,39	100
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	13.72	100	100
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52.63	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	64.55	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100

		yang mendapatkan layanan Kesehatan				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan**

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone sampai pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Misalnya angka kematian bayi dan balita serta angka kematian ibu yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Bone harus berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

Isu penting yang masih menjadi permasalahan kesehatan sampai tahun 2019 adalah masih seringnya terjadi kasus DBD. Disamping upaya dan fokus yang serius untuk menurunkan Kasus Gizi Buruk, AKB (angka kematian bayi), AKABA (angka kematian balita) dan AKI (angka kematian ibu) sampai tingkat yang serendah-rendahnya Sampai saat ini permasalahan angka kesakitan (morbiditas) masih belum stabil, munculnya beberapa penyakit baru semakin menambah beban Dinas Kesehatan disamping itu terdapat isu baru tentang stunting yang menjadi prioritas utama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

#### **A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD**

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bone serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

##### **(1) Upaya Kesehatan**

- a) Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah berjalan pada jalurnya, namun masih kurang maksimal. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya beberapa cakupan pelayanan kesehatan.
- b) Penanganan dan penanggulangan terhadap penyakit menular telah dilaksanakan walau belum maksimal. Masih tingginya penderita penyakit malaria dan TB Paru diharapkan menjadi perhatian. Penyakit yang tidak menular juga diharapkan mendapat perhatian karena jumlah penderitanya meningkat setiap tahun (Ispe, Hypertensi dan sebagainya).
- c) Upaya Promotif dan Preventif masih sangat kurang digalakkan. Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.
- d) Visi sehat pada masa mendatang akan bertumpu kepada pencapaian Desa Sehat yang dimulai pada lingkup keluarga. Strategi khusus yang telah dikembangkan di Kabupaten Bone melalui Desa/Kelurahan Siaga untuk mendukung upaya penanganan berbagai masalah kesehatan dengan basis UKBM. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dalam tataran konseptual dan belum memiliki kemandirian manajerial yang memadai untuk mendukung peningkatan aksesibilitas pelayanan.
- e) Penduduk kabupaten Bone masih ada yang belum tercakup dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), hal ini disebabkan masih ada sebagian besar masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran, olehnya itu masih perlu dipikirkan untuk perbaikan data kepesertaan serta mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

## **(2) Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- a) Jumlah tenaga kesehatan secara umum masih kurang, termasuk dokter, tenaga farmasi, tenaga analis kesehatan, tenaga gizi dan kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini akan menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.
- b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang ada tidak merata. Masih ada beberapa Puskesmas yang belum memiliki dokter serta jenis tenaga kesehatan lainnya.



- c) Kurang berjalannya beberapa program/ kegiatan juga disebabkan rendahnya kualitas SDM kesehatan.

### **(3) Manajemen Kesehatan**

- a) Dalam pelaksanaan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ evaluasi masih belum terlaksana dengan baik. Keterbatasan kemampuan dan jumlah SDM kesehatan menjadi penyebabnya.
- b) Kerja sama lintas program dan lintas sektor sangat dibutuhkan demi berjalannya pembangunan kesehatan yang terarah dan terpadu. Kondisi selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa ada tujuan yang jelas. Pembangunan yang dilakukan sektor lain pun cenderung mengabaikan “pembangunan berwawasan kesehatan”. Kerjasama antar wilayah (lintas batas) juga perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan - permasalahan kesehatan disekitar batas wilayah.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2020 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 – 2023, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Bone**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				76,432,695,640	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dinkes			74,340,234,000	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinkes			98,281,230	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinkes			36,000,100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	36,368,370	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	36,000,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dok RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	15,497,440	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dok RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dinkes	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dinkes	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 Dokumen	0	

	Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dok DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	10,817,460	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dok DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	10,937,450	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinkes	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Dok Pelaporan hasil Kinerja Perangkat daerah	2 Dokumen	24,660,510	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah Dok Pelaporan hasil Kinerja Perangkat daerah	2 Dokumen	0	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>70,635,371,010</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>69,068,796,000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/ Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	70,595,018,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/ Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	69,068,796,000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah Dokumen/ Laporan Yang tersusun	100 Persen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah Dokumen/ Laporan Yang tersusun	100 Persen	0	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Insentif /Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	72 Bulan	36,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Insentif /Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	72 Bulan	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah Dok Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	4,353,010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah Dok Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinkes			0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinkes			0	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>33,638,490</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				0	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes	Jumlah Dok Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	9,744,390	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes	Jumlah Dok Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	23,894,100	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	0	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>413,870,940</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>0</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinkes	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	1 Unit	7,429,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinkes	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	1 Unit	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkes	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	980 Orang	327,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinkes	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	980 Orang	0	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinkes	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	40 Dokumen	10,599,800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinkes	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	40 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinkes	Jumlah Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	1 Aplikasi	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinkes	Jumlah Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	1 Aplikasi	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinkes	Jumlah Pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	64 Orang	68,842,140	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinkes	Jumlah Pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	64 Orang	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkes	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek yang diikuti oleh ASN Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi	4 ASN	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinkes	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek yang diikuti oleh ASN Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi	4 ASN	0	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	5 ASN	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	5 ASN	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				451,481,170	Administrasi Umum Perangkat Daerah				285,144,300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	12 Jenis	10,062,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	12 Jenis	3,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	3 Paket	148,630,870	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	3 Paket	74,500,000	



	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah PaketPenyediaan PeralatanRumah TanggaPerkantoran sesuai rencana kebutuhan pertriwulan	1 Paket	4,957,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah PaketPenyediaan PeralatanRumah TanggaPerkantoran sesuai rencana kebutuhan pertriwulan	1 Paket	2,544,300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	3 Paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	3 Paket	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	1 Paket	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	1 Paket	0	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah Paket Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	7 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes	Jumlah Paket Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	7 Paket	0	
	Penyediaan Bahan/Material	Dinkes	Jumlah bahan / material yang tersedia sesuai kebutuhan	9 Paket	5,230,800	Penyediaan Bahan/Material	Dinkes	Jumlah bahan / material yang tersedia sesuai kebutuhan	9 Paket	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	200 Kegiatan	272,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	200 Kegiatan	204,600,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Website	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Website	0	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>4,178,080,800</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>				<b>2,580,000,000</b>	

						Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	377,950,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	29 Unit	3,600,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	29 Unit	2,580,000,000	
	Pengadaan Mebel	Dinkes	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Set	200,130,800	Pengadaan Mebel	Dinkes	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Set	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan	2 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan	2 Unit	0	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinkes			455,412,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinkes			2,217,393,600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faksimile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	156 Rekening	233,412,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faksimile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	156 Rekening	233,220,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan per bulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Dinkes dan Puskesmas)	12 Bulan	222,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan per bulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Dinkes dan Puskesmas)	12 Bulan	1,984,173,600	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinkes			166,560,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinkes			152,900,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	12 Unit	123,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	12 Unit	139,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	9 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	9 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	31 Unit	42,810,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	31 Unit	13,400,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	0	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes			215,348,295,978	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes			140,196,474,958	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			45,081,900,639	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			6,460,050,750	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinkes	Jumlah RS, sarana dan prasarana pendukung yang dibangun (Unit)	1 Unit	0	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinkes	Jumlah RS, sarana dan prasarana pendukung yang dibangun (Unit)	1 Unit	20,300,000	
	Pembangunan Puskesmas	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	2 Unit	0	Pembangunan Puskesmas	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	2 Unit	0	

	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun (Unit)	1 Unit	5,201,562,800	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun (Unit)	1 Unit	13,300,000	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	200,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	0	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan RumahSakit	Dinkes	Jumlah RS yang direhabilitasi (Unit)	1 Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinkes	Jumlah RS yang direhabilitasi (Unit)	1 Unit	0	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi (Unit)	2 Unit	10,205,345,460	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi (Unit)	2 Unit	63,300,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan mendapatkan pemeliharaan (Unit)	10 Unit	3,615,317,643	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan mendapatkan pemeliharaan (Unit)	10 Unit	9,444,750	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	208,445,850	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes	Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	0	



	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya	17 Unit	243,062,800	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya	17 Unit	0	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	40 Paket	18,697,694,332	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	40 Paket	18,093,000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibras	Dinkes	Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang terkalibrasi	40 Paket	507,740,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibras	Dinkes	Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang terkalibrasi	40 Paket	0	

	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Obat dan vaksin	38 Puskesmas	3,033,292,960	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Obat dan vaksin	38 Puskesmas	2,876,743,000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Bahan Habis Pakai	38 Puskesmas	3,067,438,644	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Bahan Habis Pakai	38 Puskesmas	3,458,870,000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	40 Paket	102,000,150	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	40 Paket	0	
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinkes			<b>169,866,420,939</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinkes			<b>133,716,424,708</b>	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	96 Persen	51,369,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	96 Persen	841,912,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	96 Persen	3,258,962,900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	96 Persen	86,543,080	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	97 Persen	307,351,370	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	97 Persen	166,150,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	68 Persen	36,507,750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	68 Persen	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	12.004 Orang	22,389,110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	12.004 Orang	8,800,000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan skreaning kesehatan sesuai standar	483.565 Orang	21,634,850	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan skreaning kesehatan sesuai standar	483.565 Orang	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Jiwa)	1.120.800 Orang	17,583,730	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Jiwa)	1.120.800 Orang	30,598,900	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	161.512 Orang	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	161.512 Orang	126,137,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus (Jiwa)	12.238 Orang	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus (Jiwa)	12.238 Orang	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (Jiwa)	1.745 Orang	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (Jiwa)	1.745 Orang	0	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes	Jumlah Penderita Tuberkulosis yang dilayani sesuai standar	2421 Orang	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes	Jumlah Penderita Tuberkulosis yang dilayani sesuai standar	2421 Orang	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes	Jumlah warga negaradengan risiko terinfeksi virus yang melemahkandaya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (jiwa)	1400 Orang	300,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes	Jumlah warga negaradengan risiko terinfeksi virus yang melemahkandaya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (jiwa)	1400 Orang	600,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kejadian KLB (%)	100 Persen	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kejadian KLB (%)	100 Persen	208,189,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinkes	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang mendapat dampak krisis kesehatan akibat bencana (%)	100 Persen	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinkes	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang mendapat dampak krisis kesehatan akibat bencana (%)	100 Persen	0	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes	Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak Balita (%)	3,4 Persen	992,908,760	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes	Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak Balita (%)	3,4 Persen	955,803,630	
			Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek ) pada anak dibawah lima tahun (%)	7.97 Persen				Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek ) pada anak dibawah lima tahun (%)	7.97 Persen		
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. (%)	5.14 Persen				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. (%)	5.14 Persen		
			Prevalensi bumil KEK (%)	14.97 Persen				Prevalensi bumil KEK (%)	14.97 Persen		
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI (%)	78 Persen				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI (%)	78 Persen		
			Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani (%)	100 Persen				Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani (%)	100 Persen		

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes	Jumlah kabupaten / kota yang melaksanakan kesehatan kerja (%)	38 Persen	152,597,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes	Jumlah kabupaten / kota yang melaksanakan kesehatan kerja (%)	38 Persen	97,925,760	
			Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan olahraga (%)	38 Persen				Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan olahraga (%)	38 Persen		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes	Jumlah Desa /Kelurahan Yang melaksanakan STBM (Desa)	372 Desa	218,842,150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes	Jumlah Desa /Kelurahan Yang melaksanakan STBM (Desa)	372 Desa	116,871,020	
			Persentase Tempat Pengolahan Makanan Yang dibina (%)	90 Persen				Persentase Tempat Pengolahan Makanan Yang dibina (%)	90 Persen		
			Persentase Tempat-tempat Umum yang dibina (%)	90 Persen				Persentase Tempat-tempat Umum yang dibina (%)	90 Persen		
			Persentase Rumah Sehat yang diawasi (%)	90 Persen				Persentase Rumah Sehat yang diawasi (%)	90 Persen		
			Persentase Pengawasan Kualitas Air minum (%)	90 Persen				Persentase Pengawasan Kualitas Air minum (%)	90 Persen		



			Persentase Pengawasan Limbah B3 di fasyankes (%)	90 Persen				Persentase Pengawasan Limbah B3 di fasyankes (%)	90 Persen		
			Persentase Tempat- Pestida yang diawasi (%)	90 Persen				Persentase Tempat- Pestida yang diawasi (%)	90 Persen		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes	Jumlah UKBM yang dibina (UKBM)	7 UKBM	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes	Jumlah UKBM yang dibina (UKBM)	7 UKBM	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional (Puskesmas)	38 Puskesmas	73,096,780	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional (Puskesmas)	38 Puskesmas	20,062,200	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi	100 Kegiatan	218,557,280	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi	100 Kegiatan	280,747,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 Persen	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 Persen	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	700 Orang	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes	Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	700 Orang	103,862,000	

	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK dan Perkesmas (Puskesmas)	38 Puskesmas	398,699,600	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK dan Perkesmas (Puskesmas)	38 Puskesmas	199,960,000	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinkes	Jumlah pengelolaan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	0	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinkes	Jumlah pengelolaan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	0	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanggulangan penyakit DBD ( Inciden Rate)per.100.000	< 49 /100.000 Penduduk	550,321,620	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanggulangan penyakit DBD ( Inciden Rate)per.100.000	< 49 /100.000 Penduduk	289,999,650	
			Prevalensi Rate Kusta per.10.000	< 1 /10.000 Penduduk				Prevalensi Rate Kusta per.10.000	< 1 /10.000 Penduduk		
			API ( Annual Parasit Infection) Malaria < 1 per.1000	< 1 /1.000 Penduduk				API ( Annual Parasit Infection) Malaria < 1 per.1000	< 1 /1.000 Penduduk		
			Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100				Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100		

			Jumlah penemuan kasus gangguan indera penglihatan dan pendengaran	14.000 Orang				Jumlah penemuan kasus gangguan indera penglihatan dan pendengaran	14.000 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan posbindu (Orang)	1.670 Orang				Jumlah peserta pelatihan posbindu (Orang)	1.670 Orang		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Jumlah Pembayaran Tagihan BPJS Premi Kapitasi dan Non Kapitasi (Bulan)	12 Bulan	151,471,210,679	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Jumlah Pembayaran Tagihan BPJS Premi Kapitasi dan Non Kapitasi (Bulan)	12 Bulan	82,740,384,800	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinkes			0	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinkes			0	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinkes			40,800,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional	Dinkes			0	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinkes	Jumlah umen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen)	1 Dokumen	146,075,150	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinkes	Jumlah umen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen)	1 Dokumen	0	

	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah telemedicine yang tersedia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Paket)	1 Paket	0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Jumlah telemedicine yang tersedia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Paket)	1 Paket	0	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinkes	Jumlah RS Rujukan Kabupaten / Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 Rumah sakit	10,942,250,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinkes	Jumlah RS Rujukan Kabupaten / Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 Rumah sakit	9,000,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif	38 Puskesmas	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif	38 Puskesmas	37,662,504,668	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah pemeriksaan kualitas Damu dan Sumber Air Bersih tersedia (Unit)	1 Unit	10,114,650	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah pemeriksaan kualitas Damu dan Sumber Air Bersih tersedia (Unit)	1 Unit	30,000,000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)	38 Puskesmas	619,967,860	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)	38 Puskesmas	0	

	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinkes	Persentase Investigasi awal kejadian tdk diharapkan	100 Persen	15,180,000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinkes	Persentase Investigasi awal kejadian tdk diharapkan	100 Persen	0	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kewaspadaan terhadap respon kejadian wabah	100 Persen	0	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kewaspadaan terhadap respon kejadian wabah	100 Persen	0	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	Persentase penyediaan sistem SPGOT	100 Persen	0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	Persentase penyediaan sistem SPGOT	100 Persen	149,974,000	
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Dinkes			0	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Dinkes			0	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek aplikasi SDMK yang digunakan (Paket)		0	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek aplikasi SDMK yang digunakan (Paket)		0	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Paket)		0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Paket)		0	

	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes	Jumlah alat / perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet (Paket)	1 Paket	0	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes	Jumlah alat / perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet (Paket)	1 Paket	0	
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinkes			399,974,400	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinkes			19,999,500	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama)	9 RS dan Klinik Utama	399,974,400	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama)	9 RS dan Klinik Utama	19,999,500	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Jumlah RS dan Klinik di Bina dan dipersiapkan akreditasinya	9 RS dan Klinik Utama	0	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Jumlah RS dan Klinik di Bina dan dipersiapkan akreditasinya	9 RS dan Klinik Utama	0	

	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes	Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama)	9 RS dan Klinik Utama	0	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes	Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama)	9 RS dan Klinik Utama	0	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinkes	Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama)	9 RS dan Klinik Utama	0	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinkes	Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama)	9 RS dan Klinik Utama	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Dinkes			0	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Dinkes			0	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)	Dinkes	Jumlah pengelola SDM yang dilakukan pembinaan	39 Orang	0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Orang)	Dinkes	Jumlah pengelola SDM yang dilakukan pembinaan	39 Orang	0	
	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Puskesmas)	Dinkes	Jumlah SISDMK yang dikelola	39 Orang	0	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Dinkes	Jumlah SISDMK yang dikelola	39 Orang	0	



						Kesehatan (Puskesmas)					
	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	
	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (Orang)	Dinkes	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan pelatihan	39 Orang	0	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (Orang)	Dinkes	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan pelatihan	39 Orang	0	
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kegiatan)	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang terbangun	4 Kegiatan	0	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kegiatan)	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang terbangun	4 Kegiatan	0	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah tenaga SDMK yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	39 Orang	0	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah tenaga SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	39 Orang	0	

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan dan Mendapatkan Jasa Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19		0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan dan Mendapatkan Jasa Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19		0	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes			0	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dokumen)	Dinkes	Jumlah Dokumen analisa rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1 Dokumen	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dokumen)	Dinkes	Jumlah Dokumen analisa rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1 Dokumen	0	

	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Fasilitas Kesehatan)	Dinkes	Jumlah Sarana dan prasarana RS yang terbangun	39 Puskesmas	0	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Fasilitas Kesehatan)	Dinkes	Jumlah Sarana dan prasarana RS yang terbangun	39 Puskesmas	0	
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Dinkes			263,330,800	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Dinkes			243,470,000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes			76,182,800	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes			14,928,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman (Sarana)	70 Sarana	42,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman (Sarana)	70 Sarana	14,928,000	

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan selama 1 tahun (Kali)	4 Kali	34,182,800	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan selama 1 tahun (Kali)	4 Kali	0	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan selama 1 tahun (Kali)	4 Kali	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan selama 1 tahun (Kali)	4 Kali	0	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes			30,000,000	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes			0	

	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman	50 sarana	3,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman	50 sarana	0	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	40 Sarana	27,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	40 Sarana	0	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes			89,500,000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes			107,152,000	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah Sarana Yang Mnedapatkan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	65 Sarana	89,500,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah Sarana Yang Mnedapatkan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	65 Sarana	107,152,000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes			0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes			0	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes	Cakupan realisasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	70	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes	Cakupan realisasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	70	0	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes			0	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes			0	
Pengendalian dan Pengawasan sertatindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapatkan pengawasan dan tindak lanjut sertifikat	70 Sarana	0	Pengendalian dan Pengawasan sertatindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapatkan pengawasan dan tindak lanjut sertifikat	70 Sarana	0	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes			67,648,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes			121,390,000	

	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapatkan pengawasan (Sarana)	85 Sarana	23,700,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes	Jumlah sarana yang mendapatkan pengawasan (Sarana)	85 Sarana	121,390,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah pengelolaan Data Pengawasan selama 1 tahun (Kali)	4 Kali	43,948,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah pengelolaan Data Pengawasan selama 1 tahun (Kali)	4 Kali	0	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Dinkes			<b>1,445,581,620</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Dinkes			<b>446,693,340</b>	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			<b>284,345,600</b>	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes			<b>178,334,000</b>	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	97 Persen	284,345,600	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	97 Persen	178,334,000	



Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinkes			214,122,890	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinkes			268,359,340	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes	Jumlah Media promosidan informasi kesehatanyang tersedia	6 Buah	214,122,890	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes	Jumlah Media promosidan informasi kesehatanyang tersedia	6 Buah	268,359,340	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinkes			947,113,130	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinkes			0	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	845 UKBM	947,113,130	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	845 UKBM	0	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2022. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kesehatan. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain Rehabilitasi Puskesmas, Rehabilitasi Rumah dinas dan Rehabilitasi gedung kantor Lainnya (Labkesda, Gedung Balai Gigi), Pembangunan baru Puskesmas (register baru dan Existing), penambahan ruangan baru puskesmas (Penambahan Volume Bangunan), pembangunan baru Pustu, Pengadaan Pusling/ambulance Puskesmas, Pengadaan Listrik Pustu / Puskesmas dan Dinas, Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Pengadaan Meubeler Puskesmas /Pustu Pengadaan PC/Laptop Puskesmas Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rehabilitasi Pustu

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di Puskesmas. Untuk teknis pelaksanaan pada tahun 2022 diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan di Puskesmas.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional difokuskan pada beberapa fokus prioritas, yaitu :

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota dan pedesaan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat, maka kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan, sebagai berikut :

- Meningkatkan sertifikasi puskesmas perawatan dalam rangka meningkatkan kualitas puskesmas perawatan
- Meningkatkan kemitraan Rumah Sakit, Puskesmas dan Forum Desa
- Meningkatkan keahlian/profesionalisme melalui sertifikasi tenaga kesehatan
- Mengembangkan posyandu pratama menjadi utama dan mandiri.
- Mengembangkan desa siaga melalui dana DID (Dana Investasi Desa)
- Meningkatkan Pemberian makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan kalori bayi dan balita
- Meningkatkan penegakkan perda tentang pelarangan penggunaan garam tidak beriodium
- Meningkatkan penggunaan obat generik dan esensial sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatkan kerjasama antara masyarakat pengusaha dan Bidang Pengawasan makanan dan obat
- Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat
- Mengembangkan cakupan rumah tangga PHBS
- Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik pada masyarakat, maka Dinas Kesehatan merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Periode 2018 - 2023.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023, Visi dan Misi Kabupaten Bone, adalah :

**VISI : “MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

**Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata Pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah-daerah yang lain yang saling menguntungkan.

**Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komperatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

**Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan data kelola pemerintah yang baik.

**MISI :**

**Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih.**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah yang berbasis desa dan kawasan pedesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk penegmbangan usaha dan pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone melalui SPM , yaitu

- 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4 Pelayanan Kesehatan Balita
- 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- 12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Beberapa indikator dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone, antara lain :

1. *Bergesernya nilai Paradigma Kesehatan dari Kuratif menjadi Preventif dan Promotif.*

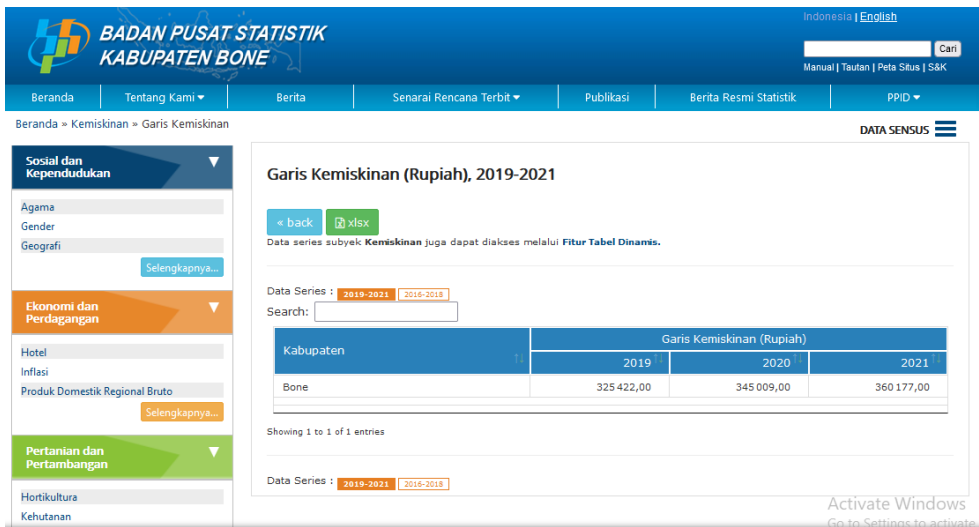
Menurut teori Blum bahwa untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan yang optimal, faktor perilaku mempunyai pengaruh lebih besar yaitu sebesar 60%, sehingga gerakan untuk merubah perilaku masyarakat harus ,mulai digalakkan program promosi kesehatan termasuk PHBS dalam upaya menuju pradigma sehat Kuratif menjadi Preventif dan Promotif.

2. *Upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan*

Perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone dikelompokkan cukup cepat dengan perbandingan hasil sensus penduduk tahun 2019 sebanyak 809,441 jiwa , penduduk Bone tumbuh 0,49% dibanding tahun 2018, dengan kepadatan penduduk 166 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan cepatnya pertumbuhan penduduk ini dan upaya peningkatan perekonomian masyarakat memerlukan perhatian penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan tersebar 38 UPTD Puskesmas diwilayah kerja 723 Desa/Kel. serta dukungan pemerintah terhadap perbaikan akses jalanan dan mobilitas lainnya.

3. *Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2019 - 2020 bahwa di Kabupaten Bone masih terdapat kategori masyarakat miskin sebanyak atau 10,05% di tahun 2019 dan 10,68% di tahun 2020 penduduk miskin.



Maka sesuai peraturan perundang-undangan maka kelompok masyarakat miskin ini mendapat jaminan pembiayaan kesehatan baik bersumber dari JKN-KIS dan Jamkesmas.

Upaya ini dimaksudkan sebagai upaya mengangkat harkat derajat masyarakat miskin agar terhindar dari masalah kesehatan sebagai pemicu dari kemiskinan mereka serta upaya mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat terpencil.

Kegiatan pembiayaan ini tetap diharapkan menumbuhkan upaya kemandirin masyarakat dan keterlibatan layanan pencegahan dan promosi kesehatan.

Kondisi Pada Tahun 2019 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin telah diintegrasikan kedalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang meliputi (Tahun 2021) :

JKN / KIS dengan Sumber Dana APBN sebanyak 376.422 jiwa.

JKN / KIS dengan Sumber Dana APBD sebanyak 239.523 jiwa.

#### **4. Kemitraan dengan Swasta dan masyarakat**

Program Paradigma sehat merupakan pendukung utama terciptanya kemitraan dan pengembangan layanan kesehatan di masyarakat melalui kegiatan Kabupaten Sehat, Desa/kelurahan Sehat ber-PHBS dan Desa/Kelurahan Siaga Aktif, dimana pihak swasta dan masyarakat telah berperan serta, berpartisipasi aktif dan berkesinambungan dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bone.

Pemerintah Kabupaten Bone Telah Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan membayar premi asuransi ke BPJS Kesehatan sebanyak 239.523 Jiwa Masyarakat miskin dan kurang mampu dengan sumber dana APBD Kabupaten Bone dan APBD Provinsi Sul-Sel dan sebanyak 376.422 Jiwa dana APBN pada tahun 2022.

### **3.1 Penentuan Isu-isu Strategis**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kesehatan, adalah :

1. Kurangnya jumlah SDM Kesehatan (Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Analis entomologi kesehatan, epidemiologi, dan sanitarian).
2. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas dalam penanganan persalinan, deteksi tumbuh kembang anak
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas perawatan)
4. Masih rendahnya kualitas pelayanan kasus komplikasi kebidanan dan neonatal
5. Masih adanya kasus BGM (Balita dibawah Garis Merah)
6. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang ditandai dengan rendahnya cakupan balita yang ditimbang di Posyandu tiap bulan.
7. Masih Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular (DM, Hipertensi, Jantung, stroke, dan kecelakaan lalulintas)

### **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik pada

masyarakat, maka Dinas Kesehatan merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Periode 2018 - 2023.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018 - 2023, Visi dan Misi Kabupaten Bone, adalah :

### **Visi**

**Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**

**Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata Pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah-daerah yang lain yang saling menguntungkan.

**Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komperatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

**Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintah yang baik.

### **Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih.**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah yang berbasis desa dan kawasan pedesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
6. Meningkatkan pelayanan politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

## **Sasaran**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten bone ada beberapa sasaran yang akan di capai di Bidang Kesehatan :

- Meningkatkan jumlah puskesmas perawatan
- Meningkatkan puskesmas perawatan dengan kualitas baik
- Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
- Meningkatkan puskesmas perawatan menjadi rumah sakit tipe D
- Terbangunnya rumah sakit tipe C
- Tersusunnya sistem rujukan yang dipatuhi oleh petugas pelayanan dasar
- Meningkatkan kompetensi bidan dalam melaksanakan penanganan persalinan dan penanganan deteksi dini tumbuh kembang anak
- Meningkatkan kompetensi tim PONED dalam penanganan persalinan
- Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan
- Meningkatkan strata posyandu sebagai usaha kesehatan berbasis masyarakat
- Meningkatkan cakupan desa siaga aktif
- Menurunnya kasus gizi buruk, dan gizi kurang
- Menurunnya GAKY
- Meningkatkan jaminan pemeliharaan bagi masyarakat miskin dan rentan
- Meningkatkan ketersediaan obat generik dan obat non generik
- Menurunnya kasus keracunan makanan pada masyarakat
- Meningkatkan TTU yang memenuhi syarat kesehatan
- Meningkatkan instansi pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
- Meningkatkan rumah tangga dengan PHBS
- Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
- Meningkatkan penemuan penyakit TB, Pneumonia, AFP, Kusta, HIV AIDs
- Menurunnya kejadian luar biasa

## **3.2 Program dan Kegiatan**

Rencana Program Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perenanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		
	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	

		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 223			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
01 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								293,710,451,538					144,300,684,000
01 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								76,432,695,640					92,413,042,000
01 02 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								98,281,230					131,500,000
01 02 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP 6 oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokumen	77 Persen	36,368,370			Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	100 %	66,500,000	
01 02 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	Jumlah Dok RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokumen	77 Persen	15,497,440			Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	100 %	15,000,000	



01	02	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokumen	77 Persen	0			Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	100 %	5,000,000
01	02	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	Jumlah Dok DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokumen	77 Persen	10,817,460			Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	100 %	15,000,000
01	02	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokumen	77 Persen	10,937,450			Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	100 %	15,000,000

01	02	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	Jumlah Dok Pelaporan hasil Kinerja Perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	2 Dokumen	77 Persen	24,660,510			Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%)	100 %	15,000,000
01	02	01		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								70,635,371,010					80,041,000,000
01	02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	12 Bulan	77 Persen	70,595,018,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	00 100 Persen	80,000,000,000
01	02	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	100 Persen	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	00 100 Persen	0
01	02	01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Insentif/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	72 Bulan	77 Persen	36,000,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	36,000,000

01	02	01	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %		77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	00 100 Persen	0
01	02	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dok Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP		100 %	5 Dokume n	77 Persen	4,353,010			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	00 100 Persen	5,000,000
01	02	01	02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %		77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	00 100 Persen	0
01	02	01	02		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>33,638,490</b>					<b>10,000,000</b>
01	02	01	02	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokume n	77 Persen	9,744,390			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,000,000
01	02	01	02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Dokume n	77 Persen	23,894,100			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,000,000

01	02	01	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							413,870,940					902,500,000		
01	02	01	02	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Unit	77 Persen	7,429,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000
01	02	01	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	980 Orang	77 Persen	327,000,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	484,000,000
01	02	01	02	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	40 Dokumen	77 Persen	10,599,800			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	20,000,000
01	02	01	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Aplikasi	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000
01	02	01	02	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	64 Orang	77 Persen	68,842,140			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	70,000,000

01	02	01	02	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek yang diikuti oleh ASN Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	4 ASN	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	110,000,000
01	02	01	02	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	5 ASN	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,500,000
01	02	01	02		Administrasi Umum Perangkat Daerah								451,481,170				642,848,000	
01	02	01	02	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	12 Jenis	77 Persen	10,062,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,038,000
01	02	01	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	3 Paket	77 Persen	148,630,870			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	85,210,000

01	02	01	02	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Paket	77 Persen	4,957,500			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
01	02	01	02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	3 Paket	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	129,000,000
01	02	01	02	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Paket	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,000,000
01	02	01	02	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	7 Paket	77 Persen	10,000,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,600,000

1	02	01	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah bahan / material yang tersedia sesuai kebutuhan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	9 Paket	77 Persen	5,230,800			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000
1	02		2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	200 Kegiatan	77 Persen	272,600,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,000
1	02		2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Website	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	12,000,000
1	02	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>4,178,080,800</b>					<b>5,515,000,000</b>
1	02	2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	3 Unit	77 Persen	377,950,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,050,000,000
1	02	2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	29 Unit	77 Persen	3,600,000,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,280,000,000

				Perangkat Daerah												
1	02	2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	3 Set	77 Persen	200,130,800			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	185,000,000
1	02	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %		77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	0
1	02	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									455,412,000	4,311,194,000			
1	02	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	156 Rekening	77 Persen	233,412,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	318,354,000



1	02	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Dinkes dan Puskesmas)	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	12 Bulan	77 Persen	222,000,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	3,992,840,000
1 02 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								166,560,000					859,000,000
1	02	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	12 Unit	77 Persen	123,750,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	240,000,000
1	02	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	9 Unit	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	180,000,000
1	02	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	31 Unit	77 Persen	42,810,000			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	239,000,000

1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Kab. Bone	100 %	1 Unit	77 Persen	0			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	200,000,000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								215,437,245,978					50,049,683,000
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								45,170,850,639					42,547,936,000
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu		Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %		52.5 Persen	0			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu		Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %		52.5 Persen	0			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0

1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu		Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %			52.5 Persen	5,201,562,800			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0	
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	5 Unit		52.5 Persen	200,000,000			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	2,500,000,000	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu		Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %			52.5 Persen	0			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0	

1 2.01	02 08	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	52.5 Persen	0	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0
1 2.01	02 09	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	52.5 Persen	10,205,345,460	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0
1 2.01	02 10	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	52.5 Persen	3,615,317,643	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0

1 2.01	02 11	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	5 Unit	52.5 Persen	208,445,850			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	2,500,000,000
1 2.01	02 13	02	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	17 Unit	52.5 Persen	243,062,800			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	7,000,000,000
1 2.01	02 14	02	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	40 Paket	52.5 Persen	18,697,694,332			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	24,012,436,000

1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang terkalibrasi	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	40 Paket	52.5 Persen	507,740,000			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	423,500,000
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Obat dan vaksin	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	38 Puskesmas	s52.5 Persen	3,033,292,960			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	3,500,000,000
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Bahan Habis Pakai	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	38 Puskesmas	s52.5 Persen	3,067,438,644			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	2,500,000,000

1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu		Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %			52.5 Persen	88,950,000			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	0
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	0.7 % 4.25 % 52.5 %	40 Paket		52.5 Persen	102,000,150			Angka balita gizi buruk Angka kematian bayi (AKB) per 1 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 1 kelahiran ibu	0.7 % 4.25 % 52.5 %	112,000,000
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									169,866,420,939	7,501,747,000				
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	96 Persen		52.5 Persen	51,369,700	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	260,902,000
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	96 Persen		52.5 Persen	3,258,962,900			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	5,796,371,000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	97 Persen		52.5 Persen	307,351,370			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	439,230,000

1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	68 Persen	52.5 Persen	36,507,750			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	98,094,000
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	22,389,110			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	30,000,000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan skreaning kesehatan sesuai standar	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	483565 Oran	g52.5 Persen	21,634,850	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	90,000,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	17,583,730			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	161512 Orang	52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	80,000,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0



1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Tuberkulosis yang dilayani sesuai standar	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	2421 Orang	52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	1400 Orang	52.5 Persen	300,000,000			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	992,908,760			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0

1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	152,597,000			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	218,842,150			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	73,096,780			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	218,557,280			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0

1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	398,699,600			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	100 Persen	52.5 Persen	550,321,620			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	707,150,000
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	151,471,210,679			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0

1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	40,800,000			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	146,075,150			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	10,942,250,000			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif	Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen	12 Kegiatan	52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	10,114,650			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0

1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	619,967,860			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	15,180,000			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dinamis dan Respon Wabah	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	Kab. Bone	100 Persen		52.5 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								0					0
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka balita gizi buruk	Kab. Bone	100 Persen		0.7 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka balita gizi buruk	Kab. Bone	100 Persen		0.7 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0

1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka balita gizi buruk	Kab. Bone	100 Persen		0.7 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								399,974,400					0
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kab. Bone	100 Persen		4.25 Persen	399,974,400			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kab. Bone	100 Persen		4.25 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Fasilitas Kesehatan Yang ditingkatkan	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kab. Bone	100 Persen	100 %	4.25 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kab. Bone	100 Persen		4.25 Persen	0			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	0
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								131,597,500					0
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								32,157,500					0

1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	Kab. Bone	0 0 100 Persen		100 Persen	1,757,500			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 0 100 Persen	0
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	Kab. Bone	0 0 100 Persen		100 Persen	30,400,000			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 0 100 Persen	0
1 02 03 2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>								99,440,000					0
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	Kab. Bone	100 Persen		100 Persen	64,640,000			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	0
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	Kab. Bone	100 Persen		100 Persen	34,800,000			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	0
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	Kab. Bone	100 Persen	97 Persen	100 Persen	0			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	0
1 02 03 2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								0					0

1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	Kab. Bone	100 Persen		100 Persen	0			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	0
1 02 04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>								<b>263,330,800</b>					<b>206,500,000</b>
1 02 04 2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>								<b>76,182,800</b>					<b>42,000,000</b>
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan		Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab. Bone	100 Persen		100 Persen	42,000,000			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	0
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab. Bone	100 Persen	60 Sarana	100 Persen	34,182,800			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	42,000,000



1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan		Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab. Bone	100 Persen	100 Persen	0			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	0
1 02 04 2.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>								30,000,000				69,500,000
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman	Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan	Kab. Bone	100 Persen	50 sarana	100 Persen	3,000,000		Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	42,000,000
1 02 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	Jumlah Perbekalan Kesehatan RT Kls 1 yang di awasi	Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan	Kab. Bone	100 Persen	40 Sarana	100 Persen	27,000,000		Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	27,500,000
1 02 04 2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>								89,500,000				95,000,000

1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	Jumlah Sarana Yang Mnedapatkan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab. Bone	100 Persen	65 Sarana	100 Persen	89,500,000			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	95,000,000
1 02 04 2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>								0					0
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan		Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab Kab. Bone	100 Persen		100 Persen	0			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	0
1 02 04 2.05	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>								0					0

1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan		Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan	Kab. Bone	100 Persen	100 Persen	0			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	0
1 02 04 2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>							67,648,000					0
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan		Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab. Bone	100 Persen	100 Persen	23,700,000			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	0
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan		Persentase pemenuhan sediaan farmasi	Kab. Bone	100 Persen	100 Persen	43,948,000			Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat, Alat kesehatan dan sarana penunjang serta Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 Persen	0
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>							1,445,581,620					1,631,459,000
1 02 05 2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							284,345,600					284,345,000

1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat Persentase penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	Indeks Keluarga Sehat	Kab. Bone	100 Persen 55 Persen	97 Persen	0.5 Persen	284,345,600			Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat Persentase penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	100 Persen 55 Persen	284,345,000
1 02 05 2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								214,122,890					400,000,000
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia	Persentase penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	Kab. Bone	100 Persen	6 Buah	55 Persen	214,122,890			Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	400,000,000
1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								947,113,130					947,114,000
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan	Persentase penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	Kab. Bone	100 Persen	845 UKBM	55 Persen	947,113,130			Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	947,114,000
<b>TOTAL</b>									293,710,451,538					144,300,684,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun anggaran 2022 merupakan rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga dituangkan, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur.

Diharapkan hasil pelaksanaan pada tahun 2022 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.